

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat keterbatasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, sehingga mungkin masih terdapat kesalahan dalam penyusunan maupun perhitungan, untuk kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 ini, semoga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi




SAUT MARULI TUA SINAGA, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19730625 199503 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi ini disusun.

Laporan Kinerja ini juga menyajikan capaian indikator sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja.

Selain itu laporan kinerja ini juga merupakan kebutuhan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi secara menyeluruh.

Dalam upaya merealisasikan *Good Governance*, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi 2025-2026. Dan pada tahun 2025 merupakan tahun pertama dari penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja		Defenisi Operasional/Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen	1.22%	1.21%	100.83%
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	Persen	85.00%	83.24%	97.93%
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi investasi tahun n-1 dikali 100%	Persen	13.10%	4.25%	32.44%
		4	Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	Persen	23.30%	8.82%	37.85%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Simpapas Online	Nilai	81.50	86.406	106.02%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	Predikat AKIP yang diperoleh DPMPTSPK berdasarkan hasil evaluasi kinerja	Nilai	80.00	88.00	110.00%

Sumber : Renstra DPMPTSPK Kab. Dairi Tahun 2025-2026, Renja 2025 , Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Hasil Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian Kinerja input atau penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun 2025 mencapai Rp.4,166,519,965 (empat miliar seratus enam puluh enam juta lima

ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 92.35%,- dari total anggaran sebesar Rp.4,511,602,437 (empat miliar lima ratus sebelas juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Upaya ke depan yang akan tetap dilakukan adalah tetap mengevaluasi beberapa kegiatan baik dari segi anggaran maupun target sasaran dengan membangun komitmen bersama dan menuangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja.....	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi	6
1.4.1 Tugas	6
1.4.2 Fungsi	7
1.4.3 Struktur Organisasi	8
1.5 Sumber Daya DPMPTSPK Kabupaten Dairi	10
1.5.1 Sumber Daya Manusia	10
1.5.2 Sarana dan Prasarana.....	12
1.6 Isu Strategis	14
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1 Perencanaan Strategis	17
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	18
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	22
2.1.3 Program dan Kegiatan	26
2.1.4 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi	28
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi	35

3.1.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	35
3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	51
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025	70
3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi	76
3.1.5 Permasalahan dan Solusi yang dilakukan	81
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	83
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	89
3.2 Realisasi Anggaran	94
BAB V PENUTUP.....	98
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberi pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja yang menyajikan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada dokumen perencanaan Renstra

DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara: (4-167/2024);
- 11) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

- 12) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 17).
- 13) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 6);
- 14) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 27).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari sistem pengendalian manajemen satuan kerja.

Sistem pengendalian manajemen ini merupakan pemenuhan terhadap strategi pencapaian tujuan (program dan kegiatan) yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran dan pada akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja harus dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan serta ketenagakerjaan selama tahun anggaran 2025.

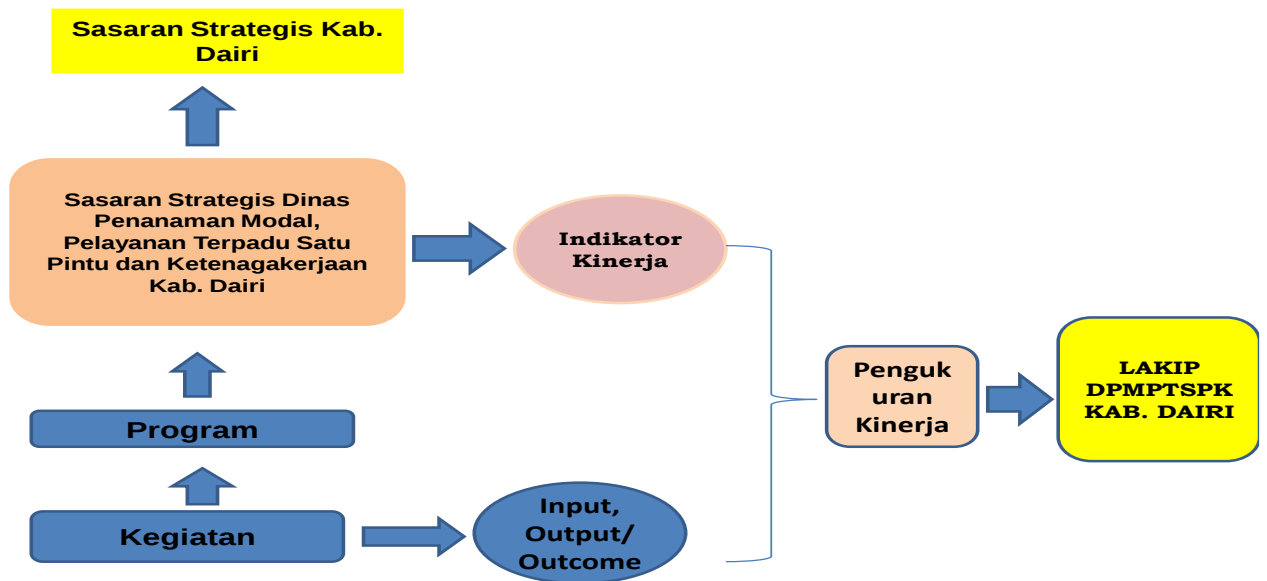
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) terhadap perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Dairi. Secara terinci, adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat secara internal dan eksternal bagi organisasi antara lain:

- Secara Eksternal, menjadikan Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun anggaran 2025.
- Secara Internal, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2025 sebagaimana sasaran evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kerja yang ditemukan pimpinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sehingga dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

Dibawah ini akan diuraikan gambaran alur pikir pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja



1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

1.4.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

1.4.2 Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

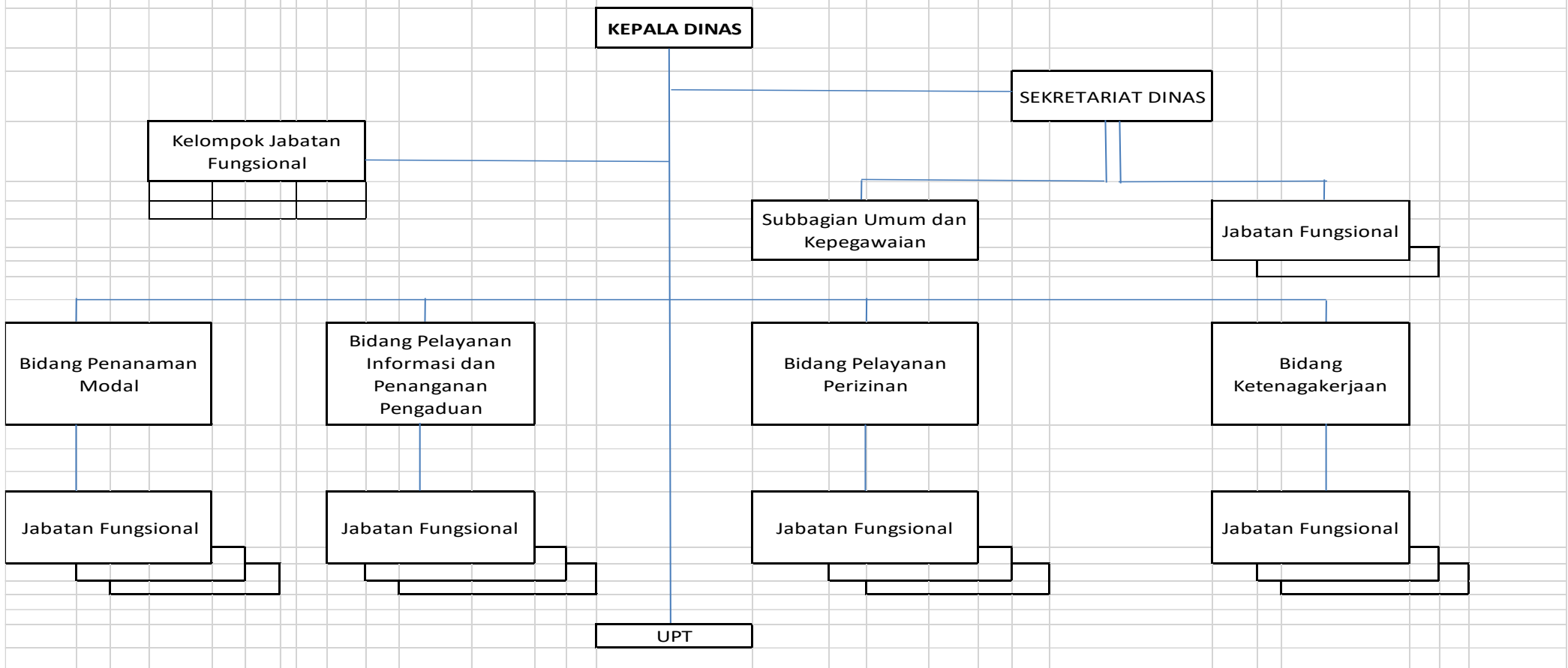
1.4.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;
- g. UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Bupati Dairi 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI



1.5 Sumber Daya DPMPTSPK Kabupaten Dairi

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi membutuhkan sumber daya manusia dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dalam mengemban tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan didukung oleh 1 (satu) UPT, yaitu UPT. BLK Sidikalang.

Dengan demikian sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh DPMPTSPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari sumber daya manusia yang ditugaskan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan Sumber Daya manusia yang ditugaskan di UPT. BLK Sidikalang.

Kondisi sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi (termasuk didalamnya UPT. BLK Sidikalang) keadaan bulan Desember 2025 sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 11 (sebelas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pada tabel dibawah ini akan diuraikan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan UPT. BLK Sidikalang berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan kualifikasi golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Kualifikasi Golongan			Jumlah (Orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan	Gol IV	Gol III	Gol II		
1	Strata 2 (S-2)	5	8	5	8	-	13	44,83
2	Strata 1 (S-1)	6	6	3	9	-	12	41,38
3	Diploma III (D-3)	2	2	-	4	-	4	13,79
4	SLTA	-	-	-	-	-	-	-
5	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	16	8	21	-	29	100,00

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPMPTSPK, Desember 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi terbanyak adalah Strata 2 (S-2) yaitu sebesar 44,83% dan disusul Strata 1 (S-1) yaitu sebesar 33,33%, kemudian diikuti dengan Pendidikan Diploma III (D-3) sebesar 14,82%.

Kemudian kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi saat ini didominasi oleh Perempuan yaitu sebanyak 16 (enam belas) orang, sementara pegawai laki-laki hanya berjumlah 11 (sebelas) orang. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan golongan adalah bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang merupakan pegawai dengan Golongan III, diikuti golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi berdasarkan kualifikasi jabatan dapat diuraikan pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Kualifikasi Jabatan
Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Kualifikasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Eselon II	1	-	1	2,50
2	Eselon III	3	2	5	12,50
3	Eselon IV	2	1	3	7,50
4	Fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas dan inpassing)	5	11	16	40,00
5	Pelaksana	2	2	4	10,00
6	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	5	6	11	27,50
Jumlah...		18	22	40	100,00

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPMPTSPK, Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa saat ini formasi jabatan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi terdiri dari: 1 (satu) Orang Eselon II, 5 (lima) orang Eselon III, 3 (tiga) orang Eselon IV, 16 (enam belas) orang atau 40% fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas atau eselon 4 dan inpassing) dan sebanyak 4 (empat) orang pelaksana.

1.5.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, DPMPTSPK Kabupaten Dairi berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor lainnya. Sarana dan Prasarana yang ada saat ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

Bangunan Gedung kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dan UPT. BLK adalah Bangunan permanen yang kondisinya baik.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi terdiri dari:

- Kendaraan Dinas Roda 4, sebanyak 1 (satu) unit
- Kendaraan Dinas Roda 2, sebanyak 3 (tiga) unit

3. Perlengkapan Kantor lainnya.

Perlengkapan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, lemari, komputer/laptop, printer dan perlengkapan kantor lainnya juga telah tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi. Terdapat juga peralatan dan mesin untuk berbagai pelatihan yang dilaksanakan di UPT. BLK Sidikalang seperti peralatan untuk pelatihan Menjahit, Las dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi termasuk didalamnya UPT. BLK Sidikalang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Komposisi Sarana dan Prasarana
Pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi

NO.	JENIS SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Personal Komputer/ PC Unit	12	Unit
2	Laptop	23	Unit
3	Peralatan Personal Komputer (Printer dan scanner)	26	Unit
4	Kendaraan Roda 4	1	Unit
5	Kendaraan Roda 2	3	Unit
6	Mesin Las Listrik	2	Unit
7	Perkakas bengkel listrik lainnya	1	Unit
8	Alat Ukur Universal - ILS. Calibration RX.	2	Unit
9	Lemari Besi/Metal	16	Buah
10	Lemari Kayu	4	Buah
11	Rak Kayu	3	Buah
12	Filling Cabinet Besi	21	Buah

13	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Buah
14	Papan Visual/Papan Nama	4	Buah
15	Mesin Absensi	1	Buah
16	Papan Nama Instansi	4	Buah
17	Meja Kerja Kayu	2	Buah
18	Meja Rapat	5	Buah
19	Tempat Tidur Besi	16	Buah
20	Tempat Tidur Kayu	8	Buah
21	Meja Panjang	2	Buah
22	Meja ½ Biro	24	Buah
23	Kasur/Spring Bed	24	Buah
24	Kursi Rapat	114	Buah
25	Kursi Putar	9	Buah
26	Bangku Tunggu	4	Buah
27	Kursi Lipat	227	Buah
28	Meja Komputer	6	Buah
29	Sofa	2	Buah
30	Meubeleur lainnya	20	Buah
31	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
32	Televisi	1	Unit
33	Sound System	3	Unit
34	Camera Video	1	Buah
35	Mesin Jahit	21	Buah
36	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) lain-lain	3	Buah
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Buah
38	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Buah
39	Peralatan Studio Audio, Peralatan Studio Video, Alat Komunikasi)	15	Buah
40	Alat Laboratorium (Hydrolic Press)	1	Buah
41	DC Power Supply	4	Buah
42	Lemari Sliding Kaca	2	Buah
43	Alat Kesehatan umum lainnya – Kursi Roda	1	Unit
44	Peralatan computer lainnya- infocus	1	Unit
45	Alat dapur lain-lain	2	Unit

1.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lingkungan kerja secara eksternal terhadap perkembangan pelayanan publik.

Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten

Dairi yang menyelenggarakan pelayanan publik menghendaki pelayanan dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dari beberapa permasalahan mendasar yang teridentifikasi maka dapat dirumuskan yang menjadi isu strategis pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 adalah:

- a. Belum optimalnya penurunan angka pengangguran;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan Penanaman Modal Daerah.

Melalui program dan kegiatan yang disusun DPMPTSPK Kabupaten Dairi dengan partisipasi berbagai pihak diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang ada.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi, Sumber Daya, Isu Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan Sistematika Penulisan Laporan Kinerja.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/iktisar perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang Pencapaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategi kinerja instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*oppoetunities*), dan tantangan/Kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan kata lain, rencana strategi yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota dalam mengambil keputusan tentang arahan masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategi bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan tujuan organisasi yang akan diwujudkan. Penjabaran visi yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi organisasi, merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya.

Dari uraian singkat diatas unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategi adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategi serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat penjabaran sasaran dan tujuan yang harus dicapai DPMPTSPK Kabupaten Dairi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan seluruh personil Aparatur Sipil Negara, yang merupakan tolak ukur bagi pimpinan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun untuk penilaian administratif pemerintahan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026. Dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan. Tujuan dan Sasaran harus dapat diukur. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*). Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Dalam setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

2.1.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai melalui pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi/instansi. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang berorientasi hasil (*outcome-impact*). Demikian juga dengan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tentunya mempunyai tujuan akan dicapai oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk jangka waktu tertentu. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yaitu:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan indikator tujuannya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi, dengan indikator tujuannya adalah Pertumbuhan investasi.

2.1.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dan indikator sasaran yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah

1. Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan indikator sasarannya: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
2. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah, dengan indikator sasarannya: Pertumbuhan investasi dan Peningkatan Investor.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, dengan indikator sasarannya: IKM Perizinan

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSPK Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-		Sasaran	Indikator Sasaran	Formula perhitungan indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-	
				2025	2026					2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	1.22%	1.21%	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen (%)	1,22%	1,21%
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	Persen (%)	85,00%	85,50%
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi	Persen (%)	13.10%	13,15%	1. Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal daerah	Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	13.10%	13.15%
							Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	23,30%	23,50%
						2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	IKM Perizinan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui <i>Simpas Online</i>	Nilai	79,00	79,50

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
2. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. Peningkatan penempatan tenaga kerja;
4. Perlindungan tenaga kerja serta Pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial;
5. Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal;
6. Optimalisasi promosi penanaman modal daerah;

7. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
8. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha;
9. optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan.

Adapun kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi untuk menjalankan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga , ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja;
2. Penyediaan sarana dan prasarana BLK.

Strategi 2 : Penyusunan database ketenagakerjaan/ rencana tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.

Strategi 3 : Peningkatan penempatan tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja.

Strategi 4 : Perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal;
2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial.

Strategi 5 : Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah;
2. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah.

Strategi 6 : Optimalisasi promosi penanaman modal daerah, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan promosi Penanaman modal daerah.

Strategi 7 : Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara online.

Strategi 8 : Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, ditempuh dengan kebijakan:

1. Optimalisasi pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan;
2. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis;
3. Optimalisasi penyelesaian permasalahan pengaduan.

Strategi 9 : Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan Renstra
DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja
		2. Penyusunan database ketenagakerjaan/ rencana tenaga kerja	2. Penyediaan Sarana dan Prasarana BLK
		3. Peningkatan penempatan tenaga kerja	3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
		4. Perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial	4. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja
2. Meningkatnya realisasi investasi	1. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	1. Peningkatan kondusivitas iklim penanaman modal	5. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal
			6. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial
		2. Optimalisasi promosi penanaman modal daerah	1. Peningkatan pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah
		3. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha	3. Peningkatan promosi penanaman modal daerah
			4. Peningkatan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara online
			1. Optimalisasi pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan
		2. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	2. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis
			3. Optimalisasi penyelesaian permasalahan pengaduan
			4. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan

2.1.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, karena program dan kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Adapun program, kegiatan serta sub kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	81.25%	165,143,000	
1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat tahun n	16 orang	165,143,000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 orang	165,143,000	

II	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	1.58%	255,254,400	
2.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 dokumen	255,254,400	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3420 orang	255,254,400	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	4,091,205,037	
3.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	100%	3,616,020,389	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	3,616,020,389	
3.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	162,649,080	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,446,800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	68,752,100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18,222,900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 laporan	72,227,280	
3.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	85,060,290	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit	85,060,290	

3.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	172,155,028	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	55,922,892	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	16,930,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 laporan	97,702,136	
3.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	55,320,250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	55,320,250	
	Total			4,511,602,437	

2.1.4 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja di lingkungan instansi masing-masing.

Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja atau ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian sasaran atau kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Indikator kinerja utama yang baik diharuskan memenuhi syarat pengukuran kinerja yang **SMART**. DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja telah berpedoman pada syarat indikator tersebut sehingga dianggap telah baik dan memenuhi unsur *SMART*, karena indikator kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi yang dituangkan dalam Renstra 2025-2026 ini telah mencerminkan syarat indikator kinerja yaitu *spesifik* (jelas), *Measureable* (terukur), indikator kinerja yang ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya atau dengan kata lain bahwa indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, *Attainable* (dapat dicapai), bahwa indikator kinerja berada dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat, *Relevant* (Indikator kinerja sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator, *Timely* (Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan).

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, DPMPTSPK Kabupaten Dairi menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026. Adapun indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan Renstra DPMPSTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut

1. Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
3. Pertumbuhan Investasi;
4. Peningkatan Investor;
5. IKM Perizinan;

Untuk lebih jelasnya pada tabel di bawah ini akan diuraikan Indikator Kinerja Utama yang **SMART** pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Utama OPD	Formula perhitungan indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen (%)	1.23%	1.22%	1.21%	1.21%
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	Persen (%)	84.81%	85.00%	85.50%	85.50%
3	Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	13.01%	13.10%	13.15%	13.15%
4	Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	23.19%	23.30%	23.50%	23.50%
5	IKM Perizinan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui <i>Simparas Online</i>	Nilai	78.366	79.00	79.50	79.50

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025-2026, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahun 2025 yang berisi perencanaan serta target yang ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPMPSTSPK Kabupaten Dairi dalam bentuk perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan penetapan kinerja kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan sasaran strategis yang akan dicapai, indikator kinerja, target kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang diletakkan pada indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Manfaat Perjanjian Kinerja adalah untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, sedangkan tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 dan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 dapat diuraikan dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,22%
		2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,00%
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3.	Pertumbuhan investasi	13,10 %
		4.	Peningkatan Investor	23,30%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5.	IKM Perizinan	81,50

Program		Anggaran	
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	165.143.000
2.	Program Hubungan Industrial	Rp.	255.254.400
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.091.205.037

Pada dasarnya target kinerja indikator IKM Perizinan sesuai dengan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 adalah 79.00, namun karena capaian indikator kinerja tahun sebelumnya telah mencapai 81.197 sehingga target indikator kinerja utama IKM Perizinan telah diubah menjadi 81.50 pada Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Disamping indikator kinerja utama yang sudah diuraikan diatas, ada 1 (satu) lagi indikator yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025, yaitu Nilai AKIP yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026, dengan uraian sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Nilai AKIP	80

Dengan demikian ada 6 (enam) indikator kinerja yang akan diuraikan dan dianalisa dalam laporan kinerja ini yang merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau ketidak tercapainya kinerja berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi yang telah diuraikan ke dalam Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu hasil pengukuran kinerja tahun 2025 dapat diuraikan di bawah ini.

3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sebelum membahas tentang perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025, maka dibawah ini disajikan terlebih dahulu realisasi capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM						
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR/ DEFENISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	(Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompeten tahun n/jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan tahun n) x 100 %	81.25%	100.00%	123.08%
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	(Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan /Jumlah Perusahaan) x 100%	1.58%	1.05%	66.46%
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah realisasi penanaman modal tahun n dikurang jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100%	13.10%	4.25%	32.44%
		4	Peningkatan Investor								

3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	IKM Perizinan	<i>Aplikasi Simparas Online</i>	81.50	86.406	106.02%
							Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan	(Jumlah perizinan yang dilayani melalui aplikasi online/ Jumlah pemohon perizinan melalui aplikasi online) x 100%	100%	100.00%	100.00%
							Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	(Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani / Jumlah pengaduan masyarakat) x 100%	99.25%	100.00%	100.76%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan tersedianya penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang ada dikali 100%	100%	100%	100%

Adapun analisis pencapaian indikator kinerja program tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun Indikator kinerja program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja adalah persentase Angkatan kerja bersertifikat kompetensi. Pada tahun 2025 capaian indikator persentase angkatan kerja bersertifikat kompetensi ini mencapai 100%. Hal ini didukung dari terlaksananya sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yaitu pelatihan Barista Kopi dengan peserta sebanyak 16 orang dan seluruh peserta lulus dan memperoleh sertifikat kompeten. Dengan demikian persentase angkatan kerja bersertifikat kompetensi akan diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi tahun } n}{\text{Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan tahun } n} \times 100\%$$

$$= \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

2) Program Hubungan Industrial

Adapun Indikator kinerja program hubungan industrial adalah Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan. Realisasi indikator kinerja persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan tahun 2024 adalah sebesar 1.58% atau dengan persentase capaian 66.16% dari target yang ditetapkan, dimana jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak berjumlah 3 perusahaan yaitu PT. DPM, PT Wahana Graha Makmur dan PT. BPR NBP 8

Sidikalang, sedangkan jumlah perusahaan sebanyak 287 Perusahaan sehingga realisasi indikator ini sesuai dengan rumusan perhitungannya adalah

Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan / Jumlah Perusahaan) x 100%

$$= \frac{3}{287} \times 100\% = 1.05\%$$

Tercapainya indikator perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada dasarnya anggaran yang mendukung pelaksanaan program ini adalah nihil disebabkan karena keterbatasan anggaran. Namun indikator program ini tetap dapat dicapai walaupun tanpa anggaran karena berhubungan dengan pelayanan penerbitan izin untuk usaha baru yang diberikan kepada Masyarakat. Semakin banyak pelaku usaha yang membuka usaha baru maka akan menambah realisasi investasi di Kabupaten Dairi. Adapun Indikator kinerja program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan realisasi penanaman modal tahun 2025 adalah sebesar 4.25% atau dengan persentase capaian 32.44% dari target yang ditetapkan, dimana jumlah realisasi investasi di

Kabupaten Dairi tahun 2025 bertambah sebesar Rp370.720.000.000 (Tiga ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Dengan demikian akumulasi realisasi investasi sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar (Miliar Rp)9.088,79.

4) Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada dasarnya anggaran yang mendukung pelaksanaan program ini adalah nihil disebabkan karena keterbatasan anggaran. Namun indikator-indikator program ini tetap dapat dicapai walaupun tanpa anggaran karena berhubungan dengan pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat. Adapun Indikator kinerja program Pelayanan Penanaman Modal adalah

- *Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan*

Realisasi indikator ini pada tahun 2025 adalah 100% atau dengan persentase capaian 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dimana *jumlah perizinan yang dilayani melalui aplikasi online* adalah sebanyak 5.554 izin dan *jumlah permohonan perizinan melalui aplikasi online* juga sebanyak 5.554 permohonan juga. Dalam hal ini seluruh permohonan dapat diproses dan diterbitkan izinnya. Adapun Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonberusaha yang telah diterbitkan serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah dipungut oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada tahun 2025 akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonberusaha Yang Telah Diterbitkan di Kabupaten Dairi
Tahun 2025

NO	URAIAN/SEKTOR/JENIS IZIN	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
I	PERIZINAN BERUSAHA	3,007	
1	Kelautan dan Perikanan	71	-
2	Lingkungan Hidup	4	-
3	Perindustrian	324	-
4	Perdagangan	1,780	-
5	Transportasi	2	-
6	Kesehatan	68	-
7	Pendidikan	49	-
8	Pariwisata	320	-
9	Ketenagakerjaan	10	-
10	Koperasi	137	-
11	Pertanian	219	-
12	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22	-
13	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	-
II	PERIZINAN NONBERUSAHA	547	
1	Surat Izin Praktik Dokter	61	-
2	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	24	-
3	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	4	-
4	Surat Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	18	-
5	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1	-
6	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1	-
7	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	7	-
8	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	134	-
9	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	200	-
10	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	13	-
11	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	4	-
12	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	2	-
13	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	2	-

14	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	2	-
15	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1	-
16	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	1	-
17	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	7	-
18	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	1	-
19	Izin Reklame	3	-
20	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	46	161,742,170
21	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	15	-
TOTAL		3,554	161,742,170

- *Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani.*

Realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang tertangani pada tahun 2025 adalah sebesar 100% atau dengan persentase capaian 100.76% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.25%, dimana jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada tahun 2025 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kasus pengaduan. Seluruh pengaduan yang diterima dapat diselesaikan sesuai dengan Standar Operional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

- **IKM Perizinan**

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online melalui laman: [Simparas.dairikab.go.id](https://simparas.dairikab.go.id) terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi pada tahun 2025 diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu sebesar **86.402** dengan jumlah responden sebanyak 302 orang. Maka dari hasil

tersebut disimpulkan bahwa kinerja terhadap 9 unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun 2025, berada dalam kategori **BAIK** karena berada dalam nilai interval konversi IKM **76,61-88,30**.

Setelah analisis realisasi indikator-indikator kinerja program sudah diuraikan diatas, maka selanjutnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan realisasi capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

TABEL 3.3
REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025

N o	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN					
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	%
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya pelatihan kerja bagi tenaga kerja berdasarkan unit kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat tahun n	16 orang	16 orang	100%
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 dokumen	1 dokumen	100%

2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi									
		4	Peningkatan Investor									
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan									
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan tersedianya penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan keterpenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan keterpenuhan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	100%	100%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa kegiatan yang mendukung pelaksanaan program DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada tahun 2025 berjumlah 6 (enam) kegiatan. Dari sejumlah kegiatan tersebut, capaian indikator kinerja dari 6 (enam) kegiatan dimaksud telah mencapai 100%. Tercapainya indikator kinerja kegiatan yang sudah diuraikan diatas tidak terlepas dari dukungan pencapaian kinerja sub kegiatannya masing-masing.

Setelah capaian kinerja kegiatan sudah diuraikan diatas, maka selanjutnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

TABEL 3.4
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

No	SASARAN STRATEGIS	No	INDIKATOR SASARAN	No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								
					URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	OUTPUT
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 orang	16 orang	100%	165,143,000	157,150,200	Terlatihnya 16 orang tenaga kerja di bidang pelatihan Barista Kopi dan masing-masing peserta mendapat sertifikat kompeten
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3420 orang	3420 orang	100%	255,254,400	254,930,400	Terlindunginya masyarakat pekerja rentan sebanyak 3.420 orang dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Keselamatan (JKM) di Kabupaten Dairi

2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi												
		4	Peningkatan Investor												
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan												
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	28 orang/bulan	100%	3,616,020,389	3,315,133,731	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Januari s/d Desember 2025
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	3,446,800	3,446,800	Terpenuhinya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor bulan Januari s/d Desember 2025
						-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	68,752,100	68,498,874	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untuk mendukung administrasi perkantoran bulan Januari s/d Desember 2025 dan Tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor untuk mendukung kebersihan kantor bulan Januari s/d Desember 2025

							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	18,222,900	18,222,900	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan untuk mendukung administrasi perkantoran Januari s/d Desember 2025
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 laporan	21 laporan	91.30%	72,227,280	59,619,960	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman rapat-rapat di kantor bulan Januari s/d Desember 2025 dan Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Desember 2025
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit	22 unit	100%	85,060,290	84,418,949	Terpenuhinya biaya jasa surat menyurat seperti materai dan jasa pengiriman surat-surat
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	100%	1,600,000	1,184,825	Terpenuhinya biaya jasa surat menyurat seperti materai dan jasa pengiriman surat-surat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	55,922,892	35,209,801	Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air kantor bulan Januari s/d Desember 2025

						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	100%	16,930,000	16,930,000	Terpenuhinya biaya perbaikan peralatan-peralatan kantor bulan Januari s/d Desember 2025
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 laporan	10 laporan	100%	97,702,136	96,722,040	Terpenuhinya biaya tenaga pendukung administrasi perkantoran bulan Januari s/d Desember 2025
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	100%	55,320,250	55,051,485	Terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional tahun 2025 dan Terpeliharanya kendaraan dinas bulan Januari s/d Desember 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada tahun 2025 berjumlah 14 (empat belas), dimana dari sejumlah sub kegiatan dimaksud, keseluruhan sub kegiatan terlaksana dengan baik dan target kinerja sub kegiatan dimaksud juga tercapai.

3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Setelah capaian masing-masing indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sudah diuraikan diatas, maka dibawah ini akan diuraikan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025.

Evaluasi pengukuran tingkat capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 dengan realisasinya dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan serta pencapaian kegiatan maksimal dan minimal suatu pelaksanaan kebijakan program dan aktifitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan tujuan organisasi. Proses pengukuran kinerja ini meliputi menetapkan indikator capaian kinerja serta analisa penyimpangan sehingga dapat dicari solusi maupun feed back penyempurnaan dimasa mendatang.

Berdasarkan target indikator kinerja DPMPTSPK yang sudah diuraikan diatas, maka dibawah ini akan diuraikan pencapaian/realisasi Indikator Kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025 disamping ada satu lagi indikator kinerja yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025 yaitu indikator *Nilai AKIP*, yang akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja		Defenisi Operasional/Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen	1.22%	1.21%	100.83%
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	Persen	85.00%	83.24%	97.93%
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	Persen	13.10%	4.25%	32.44%
		4	Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	Persen	23.30%	8.82%	37.85%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Simpapas Online	Nilai	81.50	86.402	106.02%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	Predikat AKIP yang diperoleh DPMPTSPK berdasarkan hasil evaluasi kinerja	Nilai	80.00	88.00	110.00%

Sumber : Renstra DPMPTSPK Kab. Dairi Tahun 2025-2026, Renja 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Analisis pencapaian indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi sampai dengan tahun 2025 tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena kesempatan kerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan angkatan kerja. Pengangguran terbuka mencakup individu usia kerja (15 tahun ke atas) yang sama sekali tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan atau bersiap bekerja. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dimana angkatan kerja merupakan jumlah penduduk umum yang produktif yaitu 15 sampai 64 tahun yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja.

Pada tahun 2025 angkatan kerja berjumlah 201.703 (dua ratus satu ribu tujuh ratus tiga) orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 199.257 (seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh) orang, sehingga jumlah pengangguran tahun 2025 menjadi 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) orang (*data diperoleh dari BPS*), dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}} \times 100\% \\ &= \frac{2.446 \text{ orang}}{201.703 \text{ orang}} \times 100\% = 1.21\% \end{aligned}$$

Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 adalah sebesar 1.21%. Hal ini menggambarkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya berkisar 1.21% dari angkatan kerja.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 di Kabupaten Dairi diharapkan dapat mencapai 1,22%, dan realisasinya adalah 1,21% seperti sudah diuraikan diatas, dengan persentase realisasi capaian sebesar 100.83%. Hal ini menggambarkan bahwa tahun 2025 hanya 1.21% dari angkatan kerja yang tidak terserap di lapangan kerja yang tersedia, yang menandakan semakin tinggi kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Karena pada dasarnya jika semakin tinggi nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), maka semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap, yang menandakan rendahnya kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan sebaliknya semakin rendah nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), maka semakin sedikit angkatan kerja yang tidak terserap, yang menandakan semakin tinggi kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 seperti yang sudah diuraikan diatas tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran tersebut seperti diuraikan dibawah ini:

1. Dengan mengadakan pelatihan Barista Kopi yang telah melatih para pencari kerja agar memiliki kualifikasi dan kompetensi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pencari kerja yang

telah terlatih memiliki kompetensi untuk memasuki dunia kerja dan dapat membuka wirausaha baru dengan keahlian yang telah dimilikinya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi calon pekerja.

2. Pelayanan Rekomendasi Paspor bagi pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri sebanyak 35 orang, dengan demikian penempatan tenaga kerja ke luar negeri tahun 2025 sejumlah 35 orang.
3. Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, dengan demikian terlindunginya masyarakat pekerja rentan sebanyak 3.420 orang dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Keselamatan (JKM) di Kabupaten Dairi.

Adapun program pendukung pencapaian indikator kinerja utama tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 seperti yang sudah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	$(\text{Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi tahun } n / \text{jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan tahun } n) \times 100 \%$	81.25%	100.00%	123.08%
2	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	$(\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan} / \text{Jumlah Perusahaan}) \times 100\%$	1.58%	1.05%	66.46%

Indikator kinerja program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja adalah persentase lulusan bersertifikat kompetensi. Pada tahun 2025 realisasi capaian indikator persentase lulusan bersertifikat kompetensi ini adalah sebesar 100% dengan persentase realisasi capaian 123.08% dari target yang direncanakan. Tercapainya capaian indikator persentase lulusan bersertifikat kompetensi ini didukung dengan terlaksananya sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yaitu pelatihan Barista Kopi dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang dan seluruh peserta lulus dan memperoleh sertifikat kompeten.

Selanjutnya realisasi indikator kinerja persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan tahun 2025 adalah sebesar 1.05% atau dengan persentase capaian 66.46% dari target yang ditetapkan, dimana jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan berjumlah 3 perusahaan yaitu PT. DPM, PT Wahana Graha Makmur dan PT. BPR NBP 8 Sidikalang, sedangkan jumlah perusahaan sebanyak 287 Perusahaan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang bekerja atau menganggur. TPAK merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Jumlah angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif bekerja atau

sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja mencakup *seluruh* orang berusia 15 tahun ke atas, termasuk mereka yang tidak bekerja/tidak mencari kerja seperti pelajar dan ibu rumah tangga. Dengan kata lain penduduk usia kerja merupakan jumlah Angkatan kerja dan jumlah bukan Angkatan kerja.

Rumus mencari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang diuraikan sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 angkatan kerja berjumlah 201.703 (dua ratus satu ribu tujuh ratus tiga) orang dan penduduk usia kerja sebanyak 242.321 (dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu) orang (*data diperoleh dari BPS*). Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{201.703}{242.321} \times 100\% = 83.24\%$$

Pada tahun 2025 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Dairi diharapkan dapat mencapai 85.00% dan realisasinya adalah 83.24%, dengan persentase realisasi capaian sebesar 100.83%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 83.24% penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Karena TPAK digunakan untuk mengukur seberapa aktif penduduk usia kerja terlibat di pasar tenaga kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan.

Program pendukung pencapaian indikator kinerja utama tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2025 sama dengan program pendukung pencapaian indikator tingkat pengangguran terbuka seperti yang sudah diuraikan diatas.

3. Pertumbuhan Investasi

Pertumbuhan investasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan investasi di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan investasi maka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah semakin baik. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menambah nilai guna, meningkatkan keuntungan, dan menambah produksi. Investasi dapat berupa saham atau barang modal.

Akumulasi realisasi investasi sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar (Miliar Rp) 8,718.07,- sedangkan pertambahan investasi tahun 2025 sebesar Rp370.720.000.000 (tiga ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Dengan demikian akumulasi realisasi investasi sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar (Miliar Rp)9.088,79. Dengan demikian pertumbuhan investasi pada tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{(\text{Dalam Miliar Rp.}) \ 370.72}{(\text{Dalam Miliar Rp.}) \ 8,718.07} \times 100\% = 4.25\%$$

Target indikator pertumbuhan investasi tahun 2025 di Kabupaten Dairi diharapkan mencapai 13,10%, tetapi realisasinya adalah 4.25%, dengan persentase realisasi capaian sebesar 32.44%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2025 adalah sebesar 4.25% atau investasi mengalami peningkatan sebesar (Miliar Rp.)370.72.

Rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat melakukan promosi potensi investasi di Kabupaten Dairi. Disamping itu tidak tersedianya lahan yang *clear & clean* untuk ditawarkan kepada investor.

Sebagai informasi tambahan dibawah ini akan diuraikan akumulasi realisasi investasi di Kabupaten Dairi sampai dengan tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Investasi sampai dengan Tahun 2025 di Kabupaten Dairi

No	Nama Perusahaan/Investor	Bidang Usaha/ Kegiatan	Lokasi	Realisasi Investasi (Rp Juta)
1	2	3	4	5
1	PT. Dairi Prima Mineral	Pertambangan Bijih Logam (Kontrak Karya Timah Hitam,Seng)	Parongil -Tombak Manjolor Kab. Dairi	2,282,573.650
2	PLTA Renun (PT.PLN) (2x41 MW)	PLTA	Kec. Silahisabungan	4,105,281.00
3	PT. Energy Mekar Lestari	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Pardomuan, Kec. Siempat Nempu Hilir	3,786
4	PT. Asri Power Kerta	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Perrik Mbue, Kec. Pegagan Hilir	1,500
5	PT. Asri Power Prada	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Pegagan Julu VI dan IX, Kec. Sumbul	1106.43
6	PT. Inpolo Meka Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Sungai Lau Tawar Kec. Tanah Pinem	750,000.00
7	PT. Fortius Green Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Bukittinggi Kec. Pegagan Hilir	1000.00
8	PT. Semarak Kita Bersama	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Sipoltong, Kec. Siempat Nempu Hulu	204,499.94
9	PT. Vitager Mandiri Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Sukandebi, Kec. Tigalingga	1000.00
10	PT. Karya Abadi Lestari Energi	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Lae Itam, Kec. Siempat Nempu Hilir	1000.00
11	PT. Willowtree Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Pangguruan Kec. Sumbul	1000.00
12	PT. Willowtree Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Lae Hole Kec. Parbuluan	1000.00
13	PT. Cipta Dairi Lestari Energi	Pembangkitan Tenaga Listrik	Sungai Lae Renun, Kec. Sitingo	1000.00

14	PT. Asri Dairi Hidro	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Lau Mill dan Desa lau Sireme Kec. Tigalingga	600.00
15	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Mahar Desa Lae Itam, Kec. Siempat Nempu Hilir	600.00
16	PT. Sumo Internusa Indonesia	Periklanan		30.00
17	PT. Darna Henwa	Jasa Pertambangan	Jalan Boang Manalu Desa Parongil, Kec. Silima Pungga- Pungga	18,283.41
18	PT. Sada Gas Arihta	Perdagangan Besar	Wilayah Kabupaten Dairi	1,231.00
19	PT. Wahana Graha Makmur	Budidaya Perkebunan Hortikultura, Kopi	Kel. Sidiangkat, Kec. Sitingjo	330,043.64
20	PT. Ganpati Trading	Perdagangan	Kec. Sitingjo	5.000,000
21	PT. Good Tea	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	Desa Parbuluan IV, Kec. Parbuluan	16,000.00
22	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Sileuleu Parsaoran	3,000.00
23	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dsn. Kuta Kelep Ds. Lau Bagot Kec. Tigalingga	3,000.00
24	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Lingga Lingk II Sumbul	3,000.00
25	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Lae Gerat Lingk. IV Panji Dabutar	3,000.00
26	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Panji Dabutar Kel. Panji Dabutar	3,000.00
27	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Kopi No. 16 Sidikalang	3,000.00
28	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Pendidikan Lingkungan VII Kuta Gambir Sidikalang	3,000.00
29	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Kodim Lingkungan IV Sidikalang	3,000.00
30	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Pandu Kel. Bintang Hulu	3,000.00
31	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Tiga Lingga Dusun I Desa Sungai Raya Kec. Siempat Nempu Hulu	3,000.00
32	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Lau Gunung Desa Pamah Kec. Tanah Pinem	1,100.00
33	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Huta Godung Dusun IV Desa Silalahi III Kec. Silahi Sabungan	1,100.00
34	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Lau Kinapan Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember	1,100.00
35	PT. Centratama Menara Indonesia	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun IV Lae Gering Desa Belang Malum Kec. Sidikalang	1,100.00
36	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Desa Pardomuan Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi	1,100.00

37	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Desa Lae Itam Kec. Siempat Nempu Hilir Kab. Dairi	1,100.00
38	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Runding No. 138 Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang	1,100.00
39	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun II Desa Pegagan Julu IX Kecamatan Sumbul	1,100.00
40	PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jalan Taman Wisata Iman Dusun II Desa Sijinjo Kecamatan Sijinjo	1,100.00
41	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun I Desa Bangun Kecamatan Parbuluan	1,100.00
42	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun II Sileuh Leuh Desa Sileuh Leuh Parsaoran Kecamatan Sumbul	1,100.00
43	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Desa Karing Kecamatan Berampu	1,100.00
44	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Lae Pinang Desa Bintang Kecamatan Sidikalang	1,100.00
45	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Parongil Dusun II Bantun Kerbo Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira	1,100.00
46	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun I Desa Bangun Kecamatan Parbuluan	1,100.00
47	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun II Sileuh Leuh Desa Sileuh Leuh Parsaoran Kecamatan Sumbul	1,100.00
48	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Desa Karing Kecamatan Berampu	1,100.00
49	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Lae Pinang Desa Bintang Kecamatan Sidikalang	1,100.00
50	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Parongil Dusun II Bantun Kerbo Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira	1,100.00
51	PT. Bina Usaha Mineral Indonesia	Pertambangan (Galian C)	Desa Kempawa, Kec. Tanah Pinem	1,200.00
52	Imanuel Sembiring	Pertambangan (Galian C)	Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem	1,200.00
53	UD Roy	Pertambangan (Galian C)	Desa Lau Gunung, Kec. Tanah Pinem	1,200.00
54	CV. Yorim	Pertambangan (Galian C)	Desa Kaban Julu, Kec. Lae Parira	1,200.00
55	CV. Karya Muda Pratama	Pertambangan (Galian C)	Desa Kaban Julu, Kec. Lae Parira	1,200.00
56	CV. Satria	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung Kec. Siempat Nempu	1,200.00
57	PT. Rimma Aldo Energy	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung Kec. Siempat Nempu	1,200.00
58	Jasmani Kaban	Pertambangan (Galian C)	Desa Jumantuang Kec. Siempat Nempu	1,000.00

59	Daniel Agustino Batubara	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung Kec. Siempat Nempu	1,000.00
60	CV. Bintang Jaya Mandiri	Pertambangan (Galian C)	Desa Juma Teguh, Kec. Siempat Nempu	1,000.00
61	Anju Benny H. Sinurat	Pertambangan (Galian C)	Desa Juma Teguh, Kec. Siempat Nempu	1,000.00
62	PT. Ramos Stepa Perkasa	Pertambangan (Galian C)	Desa Juma Teguh, Kec. Siempat Nempu	1,000.00
63	CV. Lumban Togu	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung, Kec. Siempat Nempu	1,000.00
64	Saut H. Siregar	Pertambangan (Galian C)	Desa Kaban Julu, Kec. Siempat Nempu	1,000.00
65	Albertus Simbolon	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung, Kec. Siempat Nempu	1,000.00
66	Anton H.P. Panggabean	Pertambangan (Galian C)	Desa Kaban Julu, Kec. Siempat Nempu	1,000.00
67	Sunta Simorangkir	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung, Kec. Siempat Nempu	1,000.00
68	Benhur Sihalohe	Pertambangan (Galian C)	Dsa Sitingo, Kec. Sitingo	1,000.00
69	Lobe Sihalohe	Pertambangan (Galian C)	Dsa Sitingo, Kec. Sitingo	1,000.00
70	UD. Ropatar	Pertambangan (Galian C)	Dusun I Desa Parbuluan IV, Kec. Parbuluan	1,000.00
71	UD. Maduma	Pertambangan (Galian C)	Dusun I Desa Parbuluan IV, Kec. Parbuluan	1,000.00
72	CV. Join Brother	Pertambangan (Galian C)	Desa Lae Hole, Kec. Parbuluan	1,000.00
73	UD. Bintang Barung-Barung	Pertambangan (Galian C)	Kel. Bintang, Kec. Sidikalang	1,000.00
74	CV. Usaha Kita	Perdagangan Besar	JL. Trikora Kec. Sidikalang	2,000.00
75	PT. Daya Indah Yasa	Perdagangan Besar	JL. SM Raja No.422 Sidikalang	10,000.00
76	PT. Nasional Bakti Raja	Perdagangan Besar	Jl. SM. Raja, Kec. Sidikalang	10,000.00
77	SPBU Naibaho	Perdagangan Besar	Jl. Pakpak, Kec. Sidikalang	10,000.00
78	SPBU Sasta	Perdagangan Besar	Desa Sitingo, Kec. Sitingo	10,000.00
79	SPBU Huta Imbaru	Perdagangan Besar	Desa Huta Imbaru, Kec. Siempat Nempu	4,622.20
80	SPBU Tigalingga	Perdagangan Besar	Kec. Tigalingga	10,000.00
81	PT. Sada Gas Arihta	Perdagangan Besar	Kec. Sumbul	3,000.00
82	PT. Maholi Mandiri Sejahtera	Perdagangan Besar	Kec. Sumbul	3,000.00
83	PT. Maholimo Karosine Gasindo	Perdagangan Besar	Kec. Berampu	3,000.00
84	PT. Tiurmaida	Perdagangan Besar	Kec. Sidikalang	4,000.00

85	PT. Arke Mitra Gasindo	Perdagangan Besar	Kec. Sumbul	4,000.00
86	PT. Kaila Elnino Gasindo	Perdagangan Besar	Jl. Persada, Desa Huta Rakyat, Kec. Sidikalang	4,000.00
87	PT. Martadiguna	Perdagangan Besar	Jl. SM. Raja, Kec. Sidikalang	4,000.00
88	PT. Manik Pratama	Perdagangan Besar	Jl. Merga Silima, Kec. Sidikalang	4,000.00
89	PT. Karya Gemilang	Perdagangan Besar	Kecamatan Sitinjo	4,000.00
90	PT. Prima Tani	Perdagangan Besar	Kecamatan Sidikalang	4,000.00
91	CV. Permata Indah	Perdagangan Besar	Kecamatan Sidikalang	4,000.00
92	CV. Pratama Karya	Perdagangan Besar	Kecamatan Sidikalang	4,000.00
93	CV. Mutiara Agro Lestari	Perdagangan Besar	Kecamatan Sidikalang	4,000.00
94	PT. Indomarco Prismalama (Indomaret)	Perdagangan	Jl. A. Yani (Simpang Salak) Kec. Sidikalang	3,000.00
95	Indomaret Jl. A. Yani	Perdagangan	Jl. A. Yani Sidikalang	3,000.00
96	CV. Mebaty (Indomaret)	Perdagangan	Jl. SM. Raja, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang	3,000.00
97	CV. Garuda Mas Sidikalang (Indomaret)	Perdagangan	Jl. SM. Raja, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang	3,000.00
98	CV. Sahabat (Indomaret)	Perdagangan	Jl. Sulang Silima , Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang	3,000.00
99	Indomaret Huta Rakyat	Perdagangan	Huta Rakyat Sidikalang	3,000.00
100	Indomaret Jl. F.L. Tobing	Perdagangan	Jl. F.L. Tobing Sidikalang	3,000.00
101	Indomaret Simpang Tiga	Perdagangan	JL.Sidikalang-Medan Sitinjo	3,000.00
102	CV. Karina (Indomaret)	Perdagangan	Jl. SM. Raja, Kec. Sumbul	3,000.00
103	Indomaret Sumbul	Perdagangan	Jl. SM. Raja, Kec. Sumbul	3,000.00
104	Indomaret Panji	Perdagangan	Panji Kec. Sitinjo	3,000.00
105	Indomaret Parbuluan	Perdagangan	Parbuluan	3,000.00
106	PT. Indomarco Prismalama (Indomaret)	Perdagangan	Kecamatan Tigalingga	3,000.00
107	Robika Market	Perdagangan	Jl. F.L. Tobing Sidikalang	3,000.00
108	Nasional Jaya Market	Perdagangan	Jl. Pekan Sidikalang	3,000.00
109	Nalambok Market	Perdagangan	JL.Sidikalang-Medan Sitinjo	3,000.00
110	Dairi Hotel	Perhotelan	Sidikalang	3,000.00

111	Hotel Sidikalang	Perhotelan	Sidikalang	3,000.00
112	Hotel Sasta	Perhotelan	Sidikalang	4,000.00
113	Hotel Cendrawasih	Perhotelan	Sidikalang	3,000.00
114	Hotel Cendrawasih II	Perhotelan	Sidikalang	3,000.00
115	Hotel Berristera	Perhotelan	Sidikalang	5,000.00
116	Mutiara Dairi Hotel	Perhotelan	Sidikalang	2,350.00
117	Hotel Angkasa Raya	Perhotelan	Sidikalang	3,032.05
118	Sidebang Hotel	Perhotelan	Kec. Silahisabungan	6,000.00
119	Hotel Hastin	Perhotelan	Sidikalang	1,950.00
120	CV. Garista Utama	Real Estate	Panji Kec. Sitinjo	15,565.00
121	Perumahan DL. Sitorus	Real Estate	Panji Kec. Sitinjo	20,000.00
122	PT. Sinar Graha	Real Estate	Jl. Pandu, Kec. Sidikalang	21,460.00
123	PDAM Tirta Nciho	Air Minum	Sidikalang	37,300.00
124	PD. Pasar Kab. Dairi	Perdagangan	Sidikalang	25,000.79
125	AEKTA ENERGI KENCANA	Pembangkitan Tenaga Listrik	Tanah Pinem	600,000.00
126	KARTIKA TAMBANG HORAS SUKSES	Penggalian Feldspar dan Kalsit	Tanah Pinem	50,000.00
127	DAYA INDAH YASA	Perdagangan Besar	Sidikalang	10,000.00
128	GOOD TEA	Perdagangan	Parbuluan	6,448.00
129	AES NATURAL INGREDIENTS INDONESIA	Industri Minyak Atsiri	Sidiangkat	11,510.00
130	ARTANA MORA SEJAHTERA	Real Estate	Sidiangkat	5,200.00
131	GRAHA TEMBEL LANG	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	Sitinjo I	5,060.00
132	LINMAR MEDIKA UTAMA	Rumah Sakit Swasta	Sidikalang	35,000.00
133	PT.HUTAHAEAN	Pertanian	Parbuluan	8,000.00
134	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL SIDIKALANG (TANJUNG BERINGIN 2)	3,000.00
135	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL SIDIKALANG (PANJI)	3,000.00
136	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	(TIGALINGGA) JL. SISINGAMANGARAJA	3,000.00
137	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL NUSANTARA (NUSANTARA)	3,000.00

138	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL. PERSADA (HUTA RAKYAT)	3,000.00
139	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL. SISINGAMANGARAJA (BATANG BERUH)	3,000.00
140	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL. SISINGAMANGARAJA (PARONGIL)	3,000.00
141	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL SISINGAMANGARAJA (SUMBUL)	3,000.00
142	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL. SISINGAMANGARAJA (SM. RAJA SIDIKALANG)	3,000.00
143	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL SISINGAMANGARAJA (SUMBUL)	3,000.00
144	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL. SISINGAMANGARAJA (SM. RAJA SIDIKALANG)	3,000.00
145	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL. SISINGAMANGARAJA (PARONGIL)	3,000.00
146	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL SIDIKALANG (TANJUNG BERINGIN 2)	2,500.00
147	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	(TIGALINGGA) JL. SISINGAMANGARAJA	2,500.00
148	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL SIDIKALANG (PANJI)	2,500.00
149	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL NUSANTARA (NUSANTARA)	2,500.00
150	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL. PERSADA (HUTA RAKYAT)	2,500.00
151	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	JL. SISINGAMANGARAJA (BATANG BERUH)	2,500.00
152	PT HIDRO POWER WOLO	Pembangkitan Tenaga Listrik	Sungai Lau Gusirlang, Kecamatan Tanah Pinem	80,000.00
153	PT DAYA INDAH YASA	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket /Supermarket/ Hypermarket	Sidikalang	400.00
154	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Jalan Lingkar, Desa Lae Hole I, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara	5,000.00
155	PT BINA USAHA MINERAL INDONESIA	Penggalian Feldspar dan Kalsit	Desa Longkotan, Kecamatan Silima Punga Punga	25.00
156	PT ASRIPOWER PRADA	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Pagagan Julu VI & IX	1,000
157	PT INTI BANGUN SEJAHTERA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Dusun I Dolok Tolong, Desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara	2,000.00
158	CV GRAHA TEMBEL LANG	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Desa Sijinjo I	200.00

159	PT ENERGY MEKAR LESTARI	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Pardomuan Kecamatan Siempatnempu Hilir	1,500.00
160	PT ASRI DAIRI HIDRO	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Lau Mil dan Desa Lau Sireme	5,000.00
161	PT BINA USAHA MINERAL INDONESIA		Desa Kuta Buluh, Kecamatan Dairi	133.98
162	PT CIPTA NIAGA SEMESTA	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	JL. RUNDING NO. 80	376.71
163	PT QDC TECHNOLOGIES	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Desa Pardomuan, Kecamatan Siempat Nemu Hilir Kabupaten Dairi	500.00
164	PT INTI BANGUN SEJAHTERA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Dusun I Dolok Tolong, Desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara	7,000.00
165	PT SOLUSI TUNAS PRATAMA	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	Dusun II Pangguruan	350.00
166	PT AES NATURAL INGREDIENTS INDONESIA		Desa Lae Mungkur, kelurahan sidiangkat	7,184.20
167	PT KOMET INFRA NUSANTARA	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Desa Lae Hole I, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara	3,000.00
168	PT MITRA NIAGA MADANI	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	PT MITRA NIAGA MADANI	735.00
169	PT.ATHAYA PERKASA HAMONANGA	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket /Supermarket/ Hypermarket	JL. SIDIKALANG-MEDAN KM 8,5	1,500.00
170	PT.HIDRO POWER WOLO	Pembangkitan Tenaga Listrik	Sungai Lau Gusirlang, Kecamatan Tanah Pinem	10,157.00
171	PT.SARDOL JAYA PERKASA	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Panji Bako II	7,500.00
172	PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Jalan Adian Nangka - Baturaja	11,500.00
173	GRAND ORI ESTATE	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Bintang Hulu	5,100.00
174	ELLO HOTEL	HOTEL	Paropo I, Kecamatan Silahisabungan	3,700.00
175	PERUMAHAN GRAHA SANJOSE KALSIM	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Kalang Simbara, Sidikalang	6,300.00
176	ISMARA RESIDENCE	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	SITINJO II	5,400.00
177	TOWER BERSAMA	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	Sosor Lontung	1,100.00
178	SURYA BAYU ENERGI	AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	Silalahi I	10,500.00

179	TELEKOMUNIKASI SELULAR	KONSTRUKSI SENTRA TELEKOMUNIKASI	Jalan PLTA - Renun, Dusun Sejahtera	11,500.00
180	CV.PERKASA	PENAMBANGAN BATU GAMPING	Desa Sosor Lontung Kecamatan Siempat Nempu dan Desa Kuta Tengah Kecamatan Siempat Nempu Hulu	2,135.00
181	PT.ATHAYA PERKASA HAMONANGAN	SUPERMARKET	SITINJO	2,850.00
182	CV.HALASAN MANDIRI	SITINJO 1	Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya	1,200.00
183	HUTAGALUNG BONA PASOGIT	Pagagan Julu I	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG)	5,100.00
184	CV.BARAKAH SAFRA ABADI	Jl Dairi No. 25	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	1,500.00
185	CV.FIONA TOSIN BERKARYA	TANJUNG BERINGIN	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	1,010.00
TOTAL				9,088,790.00

4. Peningkatan Investor

Indikator yang digunakan untuk mengetahui bertambahnya jumlah individu atau lembaga atau investor yang menanamkan modalnya di suatu daerah. Peningkatan jumlah investor dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kemudahan berinvestasi. Adapun rumusan mencari peningkatan investor adalah

$$\frac{\text{Jumlah investor tahun } n - \text{jumlah investor tahun } n-1}{\text{jumlah investor tahun } n-1} \times 100\%$$

Realisasi perusahaan sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 170 unit, sedangkan pertambahan investor tahun 2025 adalah sebanyak 15 unit. Dengan demikian realisasi peningkatan investor tahun 2025 adalah

$$= \frac{185 \text{ unit} - 170 \text{ unit}}{170 \text{ unit}} \times 100\% = 8.82\%$$

Target peningkatan investor tahun 2025 adalah sehingga persentase capaian indikator ini adalah :

$$= \frac{8.82\%}{23.30\%} \times 100\% = 37,85\%$$

Dengan demikian realisasi capaian indikator ini pada tahun 2025 mencapai 37.85% dari target yang direncanakan. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat melakukan promosi potensi investasi di Kabupaten Dairi. Disamping itu tidak tersedianya lahan yang *clear & clean* untuk ditawarkan kepada investor.

5. IKM Perizinan

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu unit pelayanan karena masyarakat adalah konsumen dari produk/jasa yang dihasilkannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara konprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online melalui laman: Simparas.dairikab.go.id terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi yaitu Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/tarif, Produk, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

86.402 dengan jumlah responden sebanyak 302 orang. Maka dari hasil tersebut disimpulkan bahwa kinerja terhadap 9 unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun 2025, berada dalam kategori **Baik** karena berada dalam nilai interval konversi IKM 76,61-88,30. Target IKM Perizinan tahun 2025 adalah 81.50, dan realisasinya adalah **86.402** sehingga persentase realisasi capaian indikator ini pada tahun 2025 telah mencapai 106.02% dari target yang direncanakan. Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di DPMPTSPK Kabupaten Dairi juga telah mencerminkan tingkat kualitas yang baik.

6. Nilai AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya ruang lingkup evaluasi AKIP yang telah dilakukan oleh Tim Penilai bagi Organisasi Perangkat Daerah memuat beberapa hal, seperti: 1).Penilaian kualitas perencanaan kinerja, 2).Penilaian pengukuran kinerja, 3). Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, 4). Penilaian evaluasi kinerja serta 5). Penilaian capaian kinerja.

Dalam hal ini realisasi capaian indikator Nilai AKIP tahun 2025 masih menggunakan realisasi capaian evaluasi Lakip DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Tim

Penilai (APIP), dimana DPMPTSPK Kabupaten Dairi memperoleh nilai sebesar 88.00 poin atau dengan Predikat “A”. Sedangkan target yang ditetapkan pada indikator ini tahun 2025 adalah 80 atau dengan predikat “BB”, dengan demikian persentase capaian indikator predikat AKIP adalah sebesar 110,00% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya pencapaian indikator kinerja Predikat AKIP didukung oleh pencapaian indikator kinerja program berikut ini:

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Pesen	100.00%	100.00%	100.00%

Realisasi capaian indikator kinerja persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar adalah sebesar 100%, hal ini didasarkan pada terwujudnya kinerja aparatur dalam penyelesaian tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025

Setelah analisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025 diuraikan, maka akan diuraikan juga perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025. Namun tidak seluruhnya realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024, hal ini disebabkan karena dengan berakhirnya Jabatan Kepala Daerah periode tahun 2019-2024 diikuti pula berakhirnya periode perencanaan jangka menengah daerah pada tahun 2024 dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 juga

berakhir pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 terjadi perubahan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

Adapun perbandingan indikator kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi sesuai dengan Renstra 2019-2024 dan sesuai dengan Renstra 2025-2026 adalah berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	
	RPD 2025-206/ Renstra 2025-2026	Sesuai Perubahan RPJMD 2019- 2024/Renstra 2019-2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja
3	Pertumbuhan investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal
4	Peningkatan Investor	-
5	IKM Perizinan	IKM Perizinan
6	Nilai AKIP	Predikat AKIP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Peningkatan Investor merupakan indikator yang baru di tahun 2025, tetapi indikator pertumbuhan investasi dengan indikator persentase peningkatan realisasi penanaman modal, walaupun nomenklaturnya berbeda tetapi masih memiliki makna dan tujuan yang sama.

Dengan demikian, perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Antara Tahun 2024 Dengan Tahun 2025
DPMPTSPK Kabupaten Dairi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)		Hasil perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2025
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1.19%	1.22%	1.43%	1.21%	83.22%	100.83%	(0.22%)
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	N/A	85.00%	83.80%	83.24%	-	97.93%	(0.56%)
3	Pertumbuhan investasi	Persen	15.00%	13.10%	14.88%	4.25%	99.20%	32.44%	(10.63%)
4	Peningkatan Investor	Persen	N/A	23.30%	0.00%	8.82%	-	37.85%	8.82%
5	IKM Perizinan	Nilai	80.00	81.50	81.197	86.402	101.50%	106.02%	5.205
6	Nilai AKIP	Nilai	80.00	80.00	93.33	88.00	116.66%	110.00%	(5.33)

Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil pebandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 menunjukkan bahwa ada realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2025 mengalami kenaikan, ada juga beberapa realisasi dan capaian indikator kinerja yang mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Adapun analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka, realisasinya menurun 0.22%

Realisasi kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 adalah sebesar 1.43% dengan persentase capaian kinerja sebesar 83.22%, sedangkan realisasi kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 adalah sebesar 1.21% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100.83%. Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0.22% apabila dibandingkan realisasi capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan semakin menurunnya pengangguran di Kabupaten Dairi. Dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.22%, maka tingkat kesempatan kerja pun telah meningkat sebesar 0.22%. Uraianya akan ditunjukkan dibawah ini:

Uraian	Satuan	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2024	2025	
Angkatan Kerja	<i>orang</i>	199,085	201,703	2,618
Penduduk bekerja	<i>orang</i>	196,244	199,257	3,013
Jumlah Pengangguran	<i>orang</i>	2,841	2,446	(395)
Tingkat Pengangguran Terbuka	<i>Persen</i>	1.43%	1.21%	(0.22%)
Tingkat Kesempatan Kerja	<i>Persen</i>	98.57%	98.79%	0.22%

Data : BPS tahun 2024 dan 2025

Kenaikan jumlah angkatan kerja ini diiringi atau diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2024.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, realisasinya menurun 0.56%

Realisasi capaian kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 adalah sebesar 83.80%, sedangkan realisasi capaian kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2025 adalah sebesar 83.24%. Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0.56% apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2024. Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bersamaan dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat terjadi karena banyak penduduk usia kerja yang keluar dari angkatan kerja (menjadi bukan angkatan kerja/bukan pengangguran), seperti pensiun dini, kembali sekolah sehingga mengurangi jumlah pengangguran secara statistik.

3. Pertumbuhan Investasi, realisasinya menurun sebesar 10.63%

Realisasi capaian indikator kinerja pertumbuhan investasi pada tahun 2024 adalah sebesar 14.88% dengan persentase capaian kinerja sebesar 99.20%, sedangkan realisasi capaian kinerja indikator pertumbuhan investasi tahun 2025 adalah sebesar 4.25% dengan persentase capaian kinerja sebesar 32.44%. Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator pertumbuhan investasi pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 10.63% apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pertumbuhan investasi tahun 2024.

Uraian akan ditunjukkan dibawah ini:

Uraian	Satuan	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2024	2025	
Akumulasi Investasi s/d	(Miliar Rp)	8,718.07	9,088.79	370.72
Pertambahan Investasi	(Miliar Rp)	1,129.41	370.72	(758.69)
Pertumbuhan Investasi	%	14.88%	4.25%	(10.63%)

4. Peningkatan Investor, realisasinya meningkat sebesar 8.82%

Realisasi capaian indikator kinerja peningkatan investor pada tahun 2024 adalah sebesar 0%, dengan kata lain pada tahun 2024 tidak ada pertambahan investor, sedangkan realisasi capaian kinerja indikator peningkatan investor tahun 2025 adalah sebesar 8.82%. Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator peningkatan investor pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 8.82% apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja peningkatan investasi pada tahun 2024.

5. IKM Perizinan, realisasinya meningkat sebesar 5.205 poin.

Realisasi kinerja indikator IKM Perizinan tahun 2024 adalah sebesar 81.197 dengan persentase capaian kinerja sebesar 101.50%, sedangkan realisasi capaian kinerja indikator IKM Perizinan tahun 2025 adalah sebesar 86.402 dengan persentase capaian kinerja sebesar 106.02%. Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator IKM Perizinan tahun 2025 meningkat sebesar 5.205 poin apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja indikator IKM Perizinan tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di DPMPSPK Kabupaten Dairi pada tahun 2025 semakin meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2024.

6. Nilai AKIP, realisasinya menurun sebanyak 5.33 poin.

Realisasi capaian kinerja indikator Nilai AKIP tahun 2024 sesuai dengan Laporan Kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah sebesar 93.33 dengan predikat “AA”, sedangkan realisasi capaian kinerja indikator Nilai AKIP tahun 2025 adalah sebesar 88.00 dengan predikat “A”. Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator Nilai AKIP tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5.33 poin apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi

Setelah perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 diuraikan diatas, maka selanjutnya akan diuraikan perbandingan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi yaitu dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026, dimana tahun 2025 adalah awal periode RPD Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 dan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

Perbandingan tingkat realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten

Dairi dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026.

Dibawah ini akan diuraikan perbandingan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi DPMPTSPK Kabupaten Dairi sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2026 DPMPTSPK Kabupaten Dairi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Kinerja pada akhir periode RPD/ Renstra	Tahun 2025			Perbandingan realisasi kinerja s.d thn 2025 dengan target Renstra
						Target	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1.21%	1.22%	1.21%	100.83%	100.00%
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	85.50%	85.00%	83.24%	97.93%	97.36%
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	Persen	13.15%	13.10%	4.25%	32.44%	32.32%
		4	Peningkatan Investor	Persen	23.50%	23.30%	8.82%	37.85%	37.53%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	Nilai	79.50	81.50	86.406	106.02%	108.69%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	Nilai	67.00	80.00	88.00	110.00%	131.34%

Sumber : RPD Kab.Dairi 2025-2026 Renstra DPMPTSPK Kab. Dairi Tahun 2025-2026, Renja 2025 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 dan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Persentase Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai tahun 2025 sebesar 100%

Target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tertuang dalam Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 pada akhir periode Renstra tahun 2025-2026 adalah 1.21%. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 telah mencapai 1.21% dengan persentase capaian 100.83%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target akhir periode indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tertuang dalam RPD Kabupaten Dairi dan Renstra tahun 2025-2026, maka realisasi persentase capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai dengan tahun 2025 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai dengan tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPD/Renstra tahun 2025-2026.

2. Realisasi Persentase Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sampai tahun 2025 sebesar 97.36%

Target indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tertuang dalam Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 pada akhir periode Renstra tahun 2025-2026 adalah 85.50%. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja

indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2025 mencapai 83.24% dengan persentase capaian 97.93%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target akhir periode indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tertuang dalam Renstra tahun 2025-2026, maka realisasi persentase capaian kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 97.36% dari target yang ditetapkan.

3. Realisasi Persentase Capaian Kinerja Pertumbuhan Investasi sampai tahun 2025 sebesar 32.32%

Target indikator Pertumbuhan Investasi yang tertuang dalam Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 pada akhir periode Renstra tahun 2025-2026 adalah 13.15%. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Pertumbuhan Investasi tahun 2025 mencapai 4.25% dengan persentase capaian 32.44%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target akhir periode indikator Pertumbuhan Investasi yang tertuang dalam RPD Kabupaten Dairi dan Renstra tahun 2025-2026, maka realisasi persentase capaian kinerja indikator Pertumbuhan Investasi sampai dengan tahun 2025 masih mencapai 32.32% dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian kinerja indikator ini disebabkan kurangnya promosi potensi investasi di Kabupaten Dairi dan tidak tersedianya lahan yang *clear & clean* untuk ditawarkan kepada investor.

4. Realisasi Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Investor sampai tahun 2025 sebesar 37.53%

Target indikator Peningkatan Investor yang tertuang dalam Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 pada akhir periode Renstra tahun 2025-2026 adalah 23.50%. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Peningkatan Investor tahun 2025 mencapai 8.82% dengan persentase capaian 37.85%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target akhir periode indikator Peningkatan Investor yang tertuang dalam RPD Kabupaten Dairi dan Renstra tahun 2025-2026, maka realisasi persentase capaian kinerja indikator Peningkatan Investor sampai dengan tahun 2025 masih mencapai 37.53% dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian kinerja indikator ini disebabkan kurangnya promosi potensi investasi di Kabupaten Dairi dan tidak tersedianya lahan yang *clear & clean* untuk ditawarkan kepada investor.

5. Realisasi Persentase Capaian Kinerja IKM Perizinan sampai tahun 2025 sebesar 108.69%.

Target indikator IKM Perizinan yang tertuang dalam Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 pada akhir periode Renstra tahun 2025-2026 adalah 79.50 poin. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator IKM Perizinan tahun 2025 telah mencapai 86.406 dengan persentase capaian 106.02%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target akhir periode indikator IKM Perizinan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Dairi dan Renstra tahun 2025-2026, maka realisasi persentase capaian kinerja indikator IKM Perizinan sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 108.69%. Hal ini menunjukkan bahwa

realisasi kinerja indikator IKM Perizinan sampai dengan tahun 2025 sudah berada diatas target yang ditetapkan pada akhir periode RPD/Renstra tahun 2025-2026. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator IKM Perizinan dalam kategori baik.

6. Realisasi Persentase Capaian Kinerja Nilai AKIP sampai tahun 2025 sebesar 131.34%.

Target indikator Nilai AKIP yang tertuang dalam RPD Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 pada akhir periode Renstra tahun 2025-2026 adalah 67 poin. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai AKIP tahun 2025 telah mencapai 88.00 poin dengan persentase capaian 110.00%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target akhir periode indikator Nilai AKIP yang tertuang dalam RPD Kabupaten Dairi tahun 2025-2026, maka realisasi persentase capaian kinerja indikator Nilai AKIP sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 131.34%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai AKIP sampai dengan tahun 2025 sudah berada diatas target yang ditetapkan pada akhir periode RPD tahun 2025-2026. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator Nilai AKIP dalam kategori memuaskan.

3.1.5 Permasalahan dan Solusi Yang Dilakukan

Dalam rangka mencapai kinerja yang baik, suatu organisasi pasti dihadapkan pada situasi berbagai permasalahan di lapangan. Demikian juga halnya dengan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam mencapai sasaran strategis yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama, tentu menghadapi beberapa permasalahan juga. Beberapa kendala yang

dihadapi DPMPTSPK Kabupaten Dairi serta solusi yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi demi suksesnya penyelenggaraan publik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Hambatan yang dihadapi dan Solusi yang telah dilaksanakan DPMPTSPK
Kabupaten Dairi

No	Hambatan atau Kendala	Solusi yang telah dilaksanakan
1	Masih ada masyarakat/ pelaku yang tidak mengetahui adanya penerapan sistem daring dalam pelayanan perizinan berusaha	➤ Bahwa DPMPTSPK Kab. Dairi telah menginformasikan secara online tentang penerapan informasi Standar Pelayanan Berbasis Website, yang dapat diakses di laman: www://dpmptspk.dairikab.go.id; ➤ DPMPTSPK Kabupaten Dairi tetap melakukan sosialisasi secara kontiniu kepada masyarakat baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media sosial (Facebook dan Website Dpmptspk) sehingga dapat memberikan manfaat maupun edukasi kepada masyarakat dalam penggunaan aplikasi layanan teknologi informasi perizinan berbasis online. ➤ Secara berkala DPMPTSPK Kabupaten Dairi melaksanakan monitoring dan evaluasi perizinan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi tentang penggunaan aplikasi layanan teknologi informasi perizinan berbasis online kepada perusahaan-perusahaan dan dapat menghimbau perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin agar mengurus izin berusahanya.
2	Budaya dan mental masyarakat/pemohon yang masih terbawa dengan sistem pelayanan yang manual, dimana masih adanya anggapan masyarakat/pemohon bahwa berkas persyaratan yang diminta untuk dilengkapi hanya alasan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPMPTSPK Kabupaten	➤ Tetap melaksanakan komunikasi dua arah antara pegawai dengan masyarakat pemohon izin dalam rangka menyampaikan informasi mengenai pelayanan perizinan yang sudah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dimana saja, Masyarakat dapat mengakses website OSS RBA melalui jaringan internet dimana dan kapan saja. ➤ DPMPTSPK Kabupaten Dairi (Pegawai front-office) juga akan membantu para pemohon untuk mengakses Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk memperoleh izin.

	Dairi untuk mempersulit dan memperlambat proses pelayanan	➤ Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi pengaduan direspon dengan cepat melalui media yang tersedia seperti: Call Center, Media Sosial dan secara Offline.
3	Masyarakat/pemohon belum memiliki kecakapan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan benar, sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi sering harus menuntun para pemohon dalam mengaktivasi sebuah akun untuk dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi yang telah ada. Kondisi ini mengakibatkan adanya perlambatan dalam pelayanan pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi.	➤ Aparatur Sipil Negara/Pegawai front-office pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi tetap membantu para pemohon izin dalam mengaktivasi sebuah akun untuk dapat mengakses website Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk memperoleh izin ➤ ASN yang bertugas pada seksi pelayanan tetap meluangkan waktu dalam menjawab dan melayani pertanyaan dari masyarakat/pemohon.
4	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM nya secara online	➤ Secara berkala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi yang bertujuan untuk menyampaikan tentang aplikasi OSS RBA kepada perusahaan-perusahaan dan menginformasikan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM secara online serta agar mendapatkan informasi tentang perkiraan Realisasi Investasi di Kabupaten Dairi sekaligus untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengusaha, hal ini sesuai dengan ketentuan Perka BKPM No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Dairi, maka Tahun Anggaran 2025 DPMPTSPK Kabupaten Dairi mendapat alokasi anggaran untuk keperluan Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.4,511,602,437 (empat miliar lima ratus sebelas juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk membiayai 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) kegiatan yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp.4,166,519,965 (empat miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 92.35%.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran atau penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut maka akan diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

N o	SASARAN STRATEGIS	No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	EFISIENSI SUMBER DAYA
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.22%	1.21%	100.83%				420,397,400	412,080,600	98.02%	2.81%
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85.00%	83.24%	97.93%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	165,143,000	157,150,200		(0.09%)
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	255,254,400	254,930,400		
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	13.10%	4.25%	32.44%				0	0	0.00%	32.44%
		4	Peningkatan Investor	23.30%	8.82%	37.85%				0	0	0.00%	37.85%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	81.50	86.406	106.02%		-	-	0	0	0.00%	106.02%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	80.00	88.00	110.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4,091,205,037	3,754,439,365	91.77%	18.23%
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,616,020,389	3,315,133,731		

							DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,446,800	3,446,800		
								-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,752,100	68,498,874		
								-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18,222,900	18,222,900		
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,227,280	59,619,960		
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85,060,290	84,418,949		
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,600,000	1,184,825		
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	35,209,801		
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	16,930,000	16,930,000		
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97,702,136	96,722,040		
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,320,250	55,051,485		
Rata-Rata Efisiensi.....													32.88%

Dengan demikian tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi atas sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian 6 (enam) indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025 adalah **32.88%**, yang didukung oleh efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan investasi, peningkatan investor, IKM perizinan dan Nilai AKIP yang diuraikan sebagai berikut:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2.81%

Untuk mendukung realisasi capaian indikator tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 sebesar 1.21% dengan persentase capaian 100.83%, maka sumber daya yang digunakan sebesar Rp.412,080,600 atau 98.02% dari pagu anggaran Rp.428,937,000. Dengan demikian efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian indikator tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 2.81%.

Adapun program yang mendukung pencapaian indikator tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 adalah program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program hubungan industrial.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk pencapaian pertumbuhan investasi sebesar 32.44%

Untuk mendukung realisasi capaian indikator pertumbuhan investasi tahun 2025 sebesar 4.25% dengan persentase capaian 32.44%, sumber daya yang digunakan sebesar Rp.0 atau Nihil atau 0.00% karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian efisiensi

penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian indikator pertumbuhan investasi tersebut adalah sebesar 32.44%.

Adapun program yang seharusnya mendukung pencapaian indikator pertumbuhan investasi adalah program pengembangan iklim penanaman modal dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, namun pada tahun 2025 anggaran yang mendukung pencapaian program dimaksud adalah Nihil.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk pencapaian peningkatan investor sebesar 37.85%

Untuk mendukung realisasi capaian indikator peningkatan investor tahun 2025 sebesar 8.82% dengan persentase capaian 37.85%, sumber daya yang digunakan sebesar Rp.0 atau Nihil atau 0.00% karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian indikator pertumbuhan investasi tersebut adalah sebesar 37.85%.

Adapun program yang seharusnya mendukung pencapaian indikator peningkatan investor adalah program pengembangan iklim penanaman modal dan program promosi penanaman modal, namun pada tahun 2025 anggaran yang mendukung pencapaian program dimaksud adalah Nihil.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk pencapaian IKM Perizinan sebesar 106.02%

Untuk mendukung capaian indikator IKM Perizinan pada tahun 2025 sebesar 86.406 poin dengan persentase capaian 106.02%, dan sumber daya yang digunakan adalah Nol (Nihil), karena keterbatasan

anggaran. Dengan demikian efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian indikator IKM Perizinan tersebut pada tahun 2025 adalah 106.02%.

Adapun program yang seharusnya mendukung pencapaian indikator IKM Perizinan adalah program pelayanan penanaman modal, namun pada tahun 2025 anggaran yang mendukung pencapaian program pelayanan penanaman modal adalah Nihil.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada tahun 2025 akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.22%	1.21%	100.83%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	165,143,000	157,150,200
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85.00%	83.24%	97.93%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	255,254,400	254,930,400
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	13.10%	4.25%	32.44%				0	0
		4	Peningkatan Investor	23.30%	8.82%	37.85%				0	0
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	81.50	86.406	106.02%		-	-	0	0
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	80.00	88.00	110.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,091,205,037	3,754,439,365
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,616,020,389	3,315,133,731

							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,446,800	3,446,800
							-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,752,100	68,498,874
							-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,222,900	18,222,900
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,227,280	59,619,960
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85,060,290	84,418,949
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,600,000	1,184,825
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	35,209,801
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	16,930,000	16,930,000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97,702,136	96,722,040
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,320,250	55,051,485

Dibawah ini akan dianalisis program, kegiatan serta sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja DPMPSTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025 antara lain:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatannya adalah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dijabarkan dalam sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan ini maka telah terlatihnya 16 orang tenaga kerja yang siap pakai berbasis kompetensi barista kopi. Dalam kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024/25 adalah dengan tercapainya sasaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan ini, maka akan sangat mendukung pencapaian target indikator dimaksud. Karena melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja diharapkan mempunyai kualitas dan kompetensi untuk memasuki pasar kerja, sehingga tentunya para tenaga kerja mempunyai kesempatan kerja memasuki pasar kerja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan tersebut merupakan pendukung pencapaian indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

2. Program Hubungan industrial

Program ini bertujuan untuk mendorong meningkatnya perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan seperti terpenuhinya hak-hak dasar pekerja. Adapun kegiatan yang

mendukung pencapaian program ini pada tahun 2025 adalah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatannya adalah Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Oleh karena itu dengan adanya pelaksanaan sub kegiatan ini maka terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja yaitu dengan terlindunginya masyarakat pekerja rentan sebanyak 3.420 orang dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Keselamatan (JKM) di Kabupaten Dairi.

Dalam kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja Tingkat Kesempatan Kerja tahun 2025 adalah dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan seperti terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, perselisihan hubungan industrial di perusahaan semakin kecil dan kesejahteraan pekerja diupayakan oleh perusahaan pemberi kerja seperti terlindunginya masyarakat pekerja rentan sebanyak 3.420 orang dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Keselamatan (JKM) di Kabupaten Dairi, maka tentunya tidak akan banyak pekerja yang mogok kerja, atau bahkan dipecat dari perusahaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan tersebut merupakan pendukung pencapaian indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran dari program ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Penyelenggaraan administrasi perkantoran juga akan mendukung pencapaian indikator kinerja di DPMPSTPK Kabupaten

Dairi. Pencapaian indikator predikat AKIP didukung oleh program ini. Karena aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja yang merupakan aspek penilaian Lakip merupakan cakupan pelayanan administrasi perkantoran.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun 2025 mencapai Rp.4,166,519,965 (empat miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 92.35%,- dari Total Belanja sebesar Rp.4,511,602,437 (empat miliar lima ratus sebelas juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). Bahwa anggaran tahun 2025 digunakan untuk membiayai 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) kegiatan yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) sub kegiatan.

Jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2024, dimana anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk membiayai 4 (empat) Program dan 8 (delapan) kegiatan yang dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu sebesar Rp.5,470,178,839 (lima miliar empat ratus puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan realisasi serapan anggarannya sebesar Rp.4,997,010,261 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sepuluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau 91.35% dari total anggaran, maka persentase serapan anggaran tahun 2025 meningkat sebesar 1.00% dibandingkan persentase serapan anggaran tahun 2024.

Penyerapan anggaran tahun 2025 untuk lebih detailnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Dairi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Anggaran	
					Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8 = (5-6)	9
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	81.25%	165,143,000	157,150,200	95.16%	7,992,800	4.84%
1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat tahun n	16 orang	165,143,000	157,150,200	95.16%	7,992,800	4.84%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 orang	165,143,000	157,150,200	95.16%	7,992,800	4.84%
II	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	1.58%	255,254,400	254,930,400	99.87%	324,000	0.13%
2.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 dokumen	255,254,400	254,930,400	99.87%	324,000	0.13%
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3420 orang	255,254,400	254,930,400	99.87%	324,000	0.13%
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	4,091,205,037	3,754,439,365	91.77%	336,765,672	8.23%

3.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	100%	3,616,020,389	3,315,133,731	91.68%	300,886,658	8.32%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	3,616,020,389	3,315,133,731	91.68%	300,886,658	8.32%
3.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	162,649,080	149,788,534	92.09%	12,860,546	7.91%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,446,800	3,446,800	100.00%	0	0.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	68,752,100	68,498,874	99.63%	253,226	0.37%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18,222,900	18,222,900	100.00%	0	0.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 laporan	72,227,280	59,619,960	82.54%	12,607,320	17.46%
3.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	85,060,290	84,418,949	99.25%	641,341	0.75%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit	85,060,290	84,418,949	99.25%	641,341	0.75%
3.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	172,155,028	150,046,666	87.16%	22,108,362	12.84%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1,600,000	1,184,825	74.05%	415,175	25.95%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	55,922,892	35,209,801	62.96%	20,713,091	37.04%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	16,930,000	16,930,000	100.00%	0	0.00%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 laporan	97,702,136	96,722,040	99.00%	980,096	1.00%
3.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	55,320,250	55,051,485	99.51%	268,765	0.49%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	55,320,250	55,051,485	99.51%	268,765	0.49%
	Total			4,511,602,437	4,166,519,965	92.35%	345,082,472	7.65%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dan merupakan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun 2025 ini, selain merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga dimaksudkan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun 2025 sehingga diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan ini menyajikan penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

Selanjutnya laporan ini juga memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan termasuk hambatan atau kendala serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam

pencapaian misi, visi dan tujuan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik kinerja kegiatan, sasaran dan anggaran serta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan kinerja.

Selain itu laporan kinerja ini juga merupakan kebutuhan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tingkat capaian-capaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dari 6 (enam) indikator kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025 yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka, IKM Perizinan dan Nilai AKIP yang capaiannya mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dimana realisasi capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1.21% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100.83%, IKM Perizinan sebesar 86.406 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 106.02% dan Nilai AKIP pada tahun 2025 adalah 88.00 poin dengan persentase capaian kinerja 110.00%, telah melampaui target atau berada diatas target yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang realisasi capainnya mendekati target yang ditetapkan, dimana realisasi capaian kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

tahun 2025 sebesar 83.24% dengan persentase capaian 97.93%. Selain itu, terdapat juga 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu indikator pertumbuhan investasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 4.25% atau dengan persentase capaian sebesar 32.44% dan peningkatan investor dengan realisasi capain kinerja sebesar 8.82% dengan persentase capaian kinerja sebesar 37.85%.

- 2) Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan, maka terdapat 3 (tiga) capaian kinerja indikator yang sudah mencapai dan bahkan sudah berada diatas target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada akhir periode RPD/Renstra tahun 2025-2026 yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 1.21% dengan persentase capaian 100% dari target jangka menengah, capaian kinerja indikator IKM Perizinan tahun 2025 adalah sebesar 86.406 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 108.69% dari target jangka menengah, capaian kinerja indikator Nilai AKIP tahun 2025 adalah 88.00 poin dengan persentase capaian 131.34% dari target jangka menengah yang ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2025 masih mencapai 83.24% dengan persentase capaian kinerja sebesar 97.36% dari target jangka menengah, capaian kinerja pertumbuhan investasi tahun 2025 adalah sebesar 4.25% dengan persentase capaian 32.32% dari target jangka menengah dan capaian kinerja indikator peningkatan investasi pada tahun 2025 sebesar 8.82% dengan persentase capaian

kinerja sebesar 37.53% dari target jangka menengah yang ditetapkan pada akhir RPD/Renstra tahun 2025-2026.

- 3) Capaian kinerja dari segi penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 meningkat sebesar 1.00% dari tahun sebelumnya, karena pada tahun 2024 realisasi serapan anggaran sebesar 91.35%, sedangkan realisasi serapan anggaran tahun 2025 mencapai 92.35%.
- 4) Jumlah perizinan yang diterbitkan tahun 2025 adalah sebesar 3.554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) izin, sedangkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dipungut DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2025 sebesar Rp.161,742,170,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Keberhasilan yang telah dicapai tentunya berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan agar target-target kinerja yang belum tercapai dapat dimaksimalkan pencapaiannya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya *outcomes* akan terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar capaian indikator penilaian tersebut dapat lebih meningkat dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Peningkatan promosi investasi unggulan Kabupaten Dairi agar pertumbuhan investasi meningkat dan lahirnya investor baru.
- 2) Peningkatan volume pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi agar pencari kerja mempunyai kompetensi dan kualitas siap kerja sehingga pengangguran semakin menurun.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

- 4) Membina kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Demikianlah laporan kinerja ini diperbuat dengan harapan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang..

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi



SAUT MARULI TUA SINAGA, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19730625 199503 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.22%	1.21%	100.83%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		165,143,000	157,150,200
								Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	165,143,000	157,150,200
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85.00%	83.24%	97.93%		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	165,143,000	157,150,200
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		255,254,400	254,930,400
								Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	255,254,400	254,930,400
								Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	255,254,400	254,930,400
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	13.10%	4.25%	32.44%	-	-	0	0
		4	Peningkatan Investor	23.30%	8.82%	37.85%	-	-	0	0
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	79.00	86.406	109.37%	-	-	0	0
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	70.00	88.00	125.71%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,091,205,037	3,754,439,365
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,616,020,389	3,315,133,731
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,616,020,389	3,315,133,731
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	162,649,080	149,788,534
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,446,800	3,446,800
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,752,100	68,498,874
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18,222,900	18,222,900
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,227,280	59,619,960

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,060,290	84,418,949
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85,060,290	84,418,949
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,155,028	150,046,666
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,600,000	1,184,825
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	35,209,801
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	16,930,000	16,930,000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97,702,136	96,722,040
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	55,320,250	55,051,485
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,320,250	55,051,485
TOTAL...									4,511,602,437	4,166,519,965

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi



SAUT MARULI TUA SINAGA, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19730625 199503 1 001

KESELARASAN KINERJA-OUTPUT-PENGANGGARAN TAHUN 2025

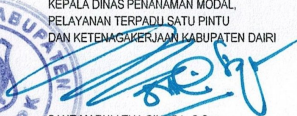
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN			
1	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya pelatihan kerja bagi tenaga kerja berdasarkan unit kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	165,143,000	157,150,200	-
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	255,254,400	254,930,400	-
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi		-					-	-	-	-	-	-	-
		4	Peningkatan Investor		-					-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan		-					-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan tersedianya penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan keterpenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,616,020,389	3,315,133,731	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,446,800	3,446,800	-
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68,752,100	68,498,874	-		
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18,222,900	18,222,900	-		
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,227,280	59,619,960	-		
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85,060,290	84,418,949

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN			
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,600,000	1,184,825	-
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	55,922,892	35,209,801	-
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,930,000	16,930,000	-
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	97,702,136	96,722,040	-
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Cakupan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55,320,250	55,051,485	-

Sidikalang, Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI



SAUT MARULI TUA SIRINGA, S.Sos
PEMBINA TKI
NIP. 19130625 199503 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Palapa No. 2 Sidikalang 22211

Telp: (0627) 424301 Fax: (0627) 424301

Website: dpmptspk.dairikab.go.id Email: dpmptspkkabdairi@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN
Jabatan : PJ. BUPATI DAIRI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidikalang, Januari 2025

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

Pihak Kedua
PJ. BUPATI DAIRI



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN,

BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660302 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,22%
		2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,00%
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3.	Pertumbuhan Investasi	13.10%
		4.	Peningkatan Investor	23,30%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5.	IKM Perizinan	81.50

- Program**
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran

Rp. 165.143.000
Rp. 4.004.367.209

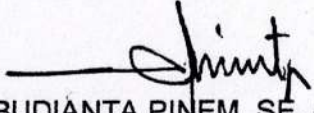
Keterangan

Sidikalang, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN


BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660302 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

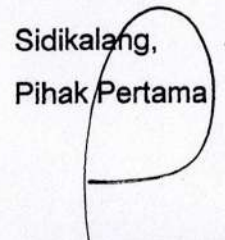
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Predikat AKIP	BB
		2	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.586.255.227	
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.446.800	
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 68.610.600	
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.222.900	
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 98.456.000	
6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.600.000	
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 55.922.892	
8. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 16.200.000	
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 100.332.540	
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 55.320.250	

Pihak Kedua


BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196603021994031001

Sidikalang, Januari 2025
 Pihak Pertama


SHAFIAH FITRISYARIANA, SH, M.Si
 PEMBINA TK.I
 NIP.196912101991032019

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, Angkatan kerja merupakan jumlah penduduk umum yang produktif yaitu 15 sampai 64 tahun	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	BPS Kabupaten Dairi
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)	Indikator yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) persentase penduduk usia kerja yang bekerja atau menganggur. TPAK merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	BPS Kabupaten Dairi
2	Meningkatnya realisasi investasi	1.Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	Pertumbuhan investasi	Persen (%)	Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan investasi di suatu daerah. Semakin tinggi persentase peningkatan realisasi investasi maka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah semakin baik. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menambah nilai guna, meningkatkan keuntungan, dan menambah produksi. Investasi dapat berupa saham atau barang modal.	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	DPMPSTSPK Kabupaten Dairi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Investor	Persen (%)	Indikator yang digunakan untuk mengetahui bertambahnya jumlah individu atau Lembaga atau investor yang menanamkan modalnya di suatu daerah. Peningkatan jumlah investor dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kemudahan berinvestasi.	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	DPMPTSPK Kabupaten Dairi
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	IKM Perizinan	Nilai	Indikator yang digunakan untuk mengukur secara konprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan perizinan yang diberikan penyelenggara pelayanan perizinan	SIMPARAS online	Hasil Survei Indeks Kepuasan Mansyarakat

Sidikalang, Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi



Budiarta Rinem
BUDIARTA RINEM, SE, Ak. M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196603021994031001

1. Dokumentasi Pelaksanaan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - Pelatihan Barista Kopi Tahun 2025



2. Dokumentasi Pelaksanaan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

